

Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Tata Kelola Keuangan Di Sektor Publik

Suci Khairani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
sucikhrani@gmail.com

Kiki Yulanda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
yulandakiki@gmail.com

Eka Nurmala Sari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ekanurmala@umsu.co.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/25962>

ABSTRACT

The role of accounting information systems (AIS) in public sector financial governance has been a key focus in numerous studies. This research aims to examine the contribution of AIS to transparency, accountability, efficiency, and integrity in public financial management. The method employed is a literature review of relevant empirical studies published between 2021 and 2024. The findings indicate that the consistent implementation of AIS positively impacts the quality of financial governance in government institutions. AIS has been proven to accelerate budget preparation, enhance internal control, and provide digital, audit-ready financial reports. These findings affirm that integrating AIS into public financial systems not only improves administrative efficiency but also strengthens public trust in government financial performance. It is recommended that public institutions expand AIS implementation and enhance human resource capacity to maximize its overall benefits.

Keyword : accounting information system, accountability, efficiency, transparency

Cara Sitasi : Khairani, S., Yulanda, K., Sari, E. N.(2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Tata Kelola Keuangan Di Sektor Publik , *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 25(2). Hal 57-66 <https://doi.org/10.30596/25962>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di sektor publik memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan terhadap tata kelola keuangan publik masih cukup kompleks, mulai dari penyalahgunaan anggaran, lemahnya sistem pengendalian internal, hingga keterbatasan integrasi data keuangan lintas instansi (Wulandari, A., & Santosa, 2023). Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, pemborosan anggaran, serta keterlambatan dalam pelaporan keuangan menjadi cerminan lemahnya sistem pengelolaan keuangan di sektor publik (Putri, R. D., & Nugroho, 2021). Kondisi ini menuntut adanya sistem yang mampu memperbaiki proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian

keuangan secara menyeluruh dan real-time, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta menghindari terjadinya penyimpangan (Setiawan, B., & Lestari, 2023).

Salah satu solusi yang diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam tata kelola keuangan publik. SIA merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi keuangan serta data terkait yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan (Nugroho, T., Widodo, S., & Lazuardi, 2022; Susanto, 2017). Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Kong, 2022). Dalam penerapannya, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berperan besar dalam mendukung kelima komponen tersebut melalui berbagai fitur dan proses yang terintegrasi secara sistematis. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, SIA tidak lagi hanya menjadi alat bantu pencatatan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan public (Wahyuni, S., & Fitriani, 2025). Di banyak daerah, masih ditemukan permasalahan mendasar seperti keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem informasi, kurangnya integrasi antara sistem perencanaan dan pelaporan keuangan, serta tidak optimalnya pemanfaatan data yang dihasilkan oleh system (Aldino, H. P., & Septiano, 2021; Lubis, I. S., & Lufriansyah, 2024). Sering kali, proses pelaporan keuangan di instansi pemerintah masih dilakukan secara manual atau semi-digital, yang mengakibatkan ketidaktepatan waktu, ketidaksesuaian data, serta risiko kesalahan yang tinggi (Prasetya, H., & Kusumawardhani, 2021). Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya tuntutan dari masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik, terutama dalam pengelolaan anggaran yang berasal dari pajak rakyat (Putri, R. D., & Nugroho, 2021).

Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mendorong penguatan tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi. Di samping itu, penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, dan berbagai aplikasi keuangan lainnya juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem keuangan publik yang lebih baik (Siregar, E., Hutabarat, D., & Ginting, 2022; Wali, N., & Firdaus, 2024). Namun, implementasi sistem-sistem tersebut tidak selalu berjalan mulus. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi dari pegawai, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap sistem baru menjadi penghambat utama keberhasilan sistem informasi akuntansi di sektor publik (Azizah, S. N., & Hidayat, 2023; Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, 2025).

Dalam konteks ini, peran SIA tidak hanya sebagai alat untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pengendalian internal yang kuat, mendeteksi potensi *fraud*, serta mendukung evaluasi kinerja anggaran secara obyektif dan berkelanjutan (Nuraini, D., & Hakim, 2024; Rachmawati, N., Ramadhan, M. T., & Hidayat, 2024). Penerapan SIA yang efektif akan memungkinkan pemerintah untuk melakukan *monitoring* terhadap pengeluaran, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas terhadap public (Bale, P. J., Marlina, T., Muanas, M., & Fahmie, 2023). Terlebih lagi, dengan sistem yang terintegrasi, informasi keuangan dapat diakses oleh berbagai pihak secara transparan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya (Prasetya, H., & Kusumawardhani, 2021).

Namun demikian, penerapan dan pemanfaatan SIA di sektor publik masih memerlukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas, tantangan, dan potensi yang dapat dioptimalkan.

Perlu dipahami bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kebijakan pendukung, serta budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan (Darmawan, A., & Nugraha, 2020). Oleh karena itu, kajian terhadap peran SIA dalam tata kelola keuangan sektor publik menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan terhadap kondisi riil di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif peran sistem informasi akuntansi dalam mendukung tata kelola keuangan di sektor publik. Fokus utama pembahasan diarahkan pada bagaimana SIA berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIA dan memberikan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsinya. Melalui pendekatan kepustakaan dan telaah konseptual, diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor publik berbasis sistem informasi akuntansi.

KAJIAN TEORI

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data keuangan serta informasi akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Dalam konteks sektor publik, SIA memiliki peran vital dalam membantu pengelolaan keuangan negara dan daerah melalui pencatatan transaksi, pelaporan anggaran, serta pengendalian keuangan yang terstandar dan terdokumentasi secara sistematis (Wali & Firdaus, 2024). Menurut Bodnar dan Hopwood (2013), SIA terdiri atas lima komponen utama, yaitu: (1) orang yang menggunakan sistem, (2) prosedur dan instruksi, (3) data, (4) perangkat lunak, dan (5) infrastruktur teknologi informasi. Kelima komponen ini harus saling terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal. Dalam praktiknya, SIA mampu mempercepat proses pelaporan, meningkatkan ketelitian, serta meminimalkan kesalahan dan risiko penyalahgunaan data (Setiawan & Lestari, 2023; Rachmawati, Ramadhan, & Hidayat, 2024).

Tata Kelola Keuangan Sektor Publik

Tata kelola keuangan sektor publik merujuk pada serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Menurut (Mardiana et al., 2022), tata kelola keuangan yang baik mencakup perencanaan anggaran yang partisipatif, pelaksanaan anggaran yang efisien, pelaporan keuangan yang transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran negara. Menurut World Bank 2015, Tata kelola yang baik (*good governance*) dalam sektor publik mengandung prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya memerlukan prosedur yang tertulis tetapi juga dukungan sistem yang mampu menjamin keakuratan, konsistensi, dan aksesibilitas informasi keuangan oleh para pemangku kepentingan (Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, 2020).

Hubungan SIA dan Tata Kelola Keuangan

Sistem Informasi Akuntansi memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang efektif di sektor publik. Dengan adanya SIA, proses penganggaran, pelaporan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini sejalan

dengan temuan (Nur Latifah & Suhendi, 2020) yang menyatakan bahwa SIA yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan mengurangi potensi penyimpangan keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya mendukung pentingnya SIA dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik. Penelitian oleh (Susanto, 2017) menunjukkan bahwa implementasi SIA yang efektif di lingkungan pemerintahan daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempercepat proses audit internal. Sementara itu, penelitian oleh (Putri, R. D., & Nugroho, 2021) menyimpulkan bahwa SIA memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Siregar, E., Hutabarat, D., & Ginting, 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan SIA dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan komitmen manajemen dalam mendukung transformasi digital. Mereka menekankan bahwa hanya dengan integrasi yang baik antara aspek teknis dan manajerial, SIA dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengendalian keuangan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa sistem ini mendukung pengawasan internal dan deteksi dini terhadap kecurangan (Bale, P. J., Marlina, T., Muanas, M., & Fahmie, 2023; Wulandari, A., & Santosa, 2023). Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIA memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan tata kelola keuangan sektor publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, serta dukungan kebijakan dari pemerintah (Azizah, S. N., & Hidayat, 2023).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bertujuan untuk menggambarkan peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai instrumen pengendalian internal dalam sektor publik. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-induktif, yakni dimulai dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau realitas yang spesifik terkait implementasi dan efektivitas SIA dalam mendukung pengendalian internal, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan yang bersifat umum.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi literatur primer maupun sekunder, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta dokumen resmi yang membahas konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi, prinsip-prinsip pengendalian internal, dan praktik penerapannya di lingkungan sektor publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kualitas pengendalian internal, serta menilai kontribusinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran sistem informasi akuntansi (SIA) dalam tata kelola keuangan sektor publik telah menjadi pusat perhatian dalam banyak studi kontemporer. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa penerapan SIA secara konsisten mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta integritas pengelolaan keuangan publik. Penelitian-penelitian mutakhir mendukung hubungan positif antara penggunaan SIA dan peningkatan kualitas tata kelola di sektor publik.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) telah terbukti memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan sektor publik. Sejalan dengan teori dari (Romney dan Steinbart 2018), transparansi keuangan dapat tercapai ketika informasi dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, SIA memungkinkan penyajian laporan keuangan yang digital, terstruktur, dan dapat diaudit secara otomatis. Penelitian oleh (Putri, R. D., & Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan SIA mengalami peningkatan transparansi dalam laporan keuangan tahunan mereka, di mana setiap transaksi tercatat dengan sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan kemungkinan penyimpangan.

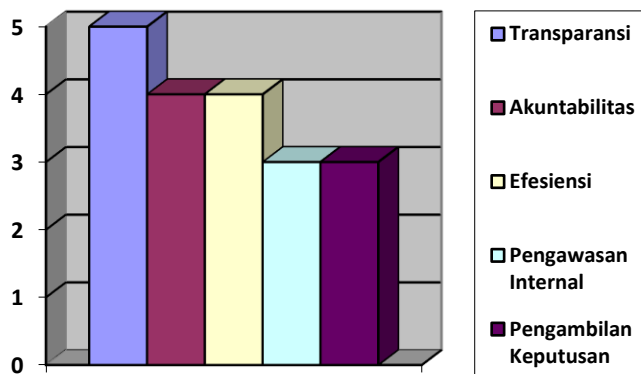
Hasil kajian literatur juga mendukung temuan ini. Seperti yang dirangkum dalam Tabel 1, terdapat berbagai penelitian yang memperlihatkan hubungan positif antara implementasi SIA dan peningkatan indikator tata kelola keuangan publik. Penelitian oleh (Siregar, E., Hutabarat, D., & Ginting, 2022) menekankan bahwa penggunaan SIA secara signifikan mempercepat proses penyusunan dan evaluasi anggaran daerah. Sementara itu, (Wulandari, A., & Santosa, 2023) mencatat bahwa penerapan SIA juga memperkuat sistem pengawasan internal dengan memberikan kemudahan dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan integritas data keuangan. Penelitian (Rachmawati, N., Ramadhan, M. T., & Hidayat, 2024) bahkan menambahkan bahwa SIA yang terintegrasi dengan sistem audit internal mampu meningkatkan integritas dan ketepatan informasi keuangan pemerintah. Temuan serupa juga diperoleh oleh (Setiawan, B., & Lestari, 2023) yang menekankan bahwa SIA memperkuat akuntabilitas keuangan dalam tata kelola publik.

Tabel berikut menunjukkan ringkasan hasil studi literatur mengenai peran SIA terhadap indikator tata kelola keuangan sektor publik:

Tabel 1. Dampak SIA terhadap Transparansi Keuangan Berdasarkan Kajian Literatur

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Putri & Nugroho	2021	Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan	SIA meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
Siregar, Hutabarat & Ginting	2022	Efisiensi dan efektivitas anggaran daerah	SIA mempercepat proses penyusunan dan evaluasi anggaran.
Wulandari & Santosa	2023	Peningkatan pengawasan internal melalui SIA	SIA mendukung pengendalian internal dan deteksi dini terhadap kecurangan.
Rachmawati et al.	2024	Integrasi sistem informasi dan audit sektor publik	SIA terintegrasi dengan sistem audit internal meningkatkan integritas keuangan.

Untuk memperjelas dampak penerapan SIA terhadap komponen tata kelola keuangan, berikut adalah grafik batang berdasarkan intensitas temuan dari literatur review:



Gambar 1. Dampak Penerapan SIA terhadap Komponen Tata Kelola Keuangan di Sektor Publik

Gambar diatas menunjukkan bahwa transparansi merupakan komponen tata kelola keuangan yang paling sering disebutkan sebagai hasil dari penerapan SIA. Hal ini menandakan bahwa sistem informasi berkontribusi besar dalam membuka akses publik terhadap proses keuangan negara, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Prasetya, H., & Kusumawardhani, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai prasyarat utama pengelolaan keuangan negara yang baik.

Selain meningkatkan transparansi, SIA juga memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan efisiensi dan pengawasan internal. Penelitian oleh (Siregar, E., Hutabarat, D., & Ginting, 2022) menekankan bahwa penerapan SIA mempercepat penyusunan dan evaluasi anggaran, yang sebelumnya memerlukan proses manual yang panjang dan rawan kesalahan. Dengan adanya digitalisasi melalui SIA, instansi pemerintah dapat mengurangi beban administratif, memangkas waktu, serta mengefektifkan alur kerja akuntansi keuangan. Hal ini memperkuat teori Gelinas, Dull, dan Wheeler 2020 bahwa sistem informasi yang dirancang dengan baik akan meningkatkan efisiensi operasional organisasi melalui otomatisasi dan penyederhanaan proses (Wahyuni, S., & Fitriani, 2025).

SIA juga memainkan peran penting dalam pengawasan internal, terutama dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan. (Wulandari, A., & Santosa, 2023) menemukan bahwa sistem ini mampu mengidentifikasi transaksi abnormal secara dini melalui fitur pelacakan (*audit trail*) dan pembatasan akses berbasis otorisasi. Fungsi ini memperkuat sistem pengendalian internal dan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data atau penyalahgunaan dana. Dalam konteks ini, hasil penelitian tersebut selaras dengan pandangan yang menyebutkan bahwa pengawasan internal akan efektif jika didukung oleh sistem informasi yang mampu mendeteksi kesalahan dan ketidakwajaran secara otomatis (Azizah, S. N., & Hidayat, 2023).

Gambar 1 memperkuat hasil temuan ini. Grafik batang tersebut menggambarkan lima komponen utama dalam tata kelola keuangan publik yang dipengaruhi oleh penerapan SIA: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, pengawasan internal, dan pengambilan keputusan. Nilai tertinggi terlihat pada aspek transparansi, diikuti oleh akuntabilitas dan efisiensi, sementara pengawasan internal dan pengambilan keputusan juga menunjukkan dampak yang positif meski tidak sekuat tiga komponen lainnya. Grafik ini disusun berdasarkan intensitas temuan dari berbagai literatur tahun 2020–2024 dan mencerminkan persepsi akademik serta praktik lapangan yang berkembang.

Lebih lanjut, integrasi antara SIA dan sistem audit internal sebagaimana dijelaskan

oleh (Rachmawati, N., Ramadhan, M. T., & Hidayat, 2024), menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan integritas data keuangan. Dalam studi mereka, ditemukan bahwa kolaborasi antara SIA dan audit internal dapat meningkatkan akurasi, mempercepat proses audit, dan memperkecil peluang terjadinya fraud dalam laporan keuangan sektor publik. Penemuan ini juga didukung oleh (Nuraini, D., & Hakim, 2024) yang menekankan pentingnya integrasi sistem audit dan SIA untuk menciptakan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan. SIA memungkinkan pelaporan yang lebih tepat waktu dan relevan untuk pengambilan keputusan, sehingga mendukung prinsip good governance (Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, 2020).

Transparansi: SIA Memudahkan Akses dan Pelaporan Informasi Keuangan

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik secara nyata meningkatkan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan (Nugroho, T., Widodo, S., & Lazuardi, 2022) yang menyatakan bahwa SIA mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan digitalisasi laporan, setiap transaksi terekam secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, memudahkan pelacakan dan audit. Penelitian oleh (Putri, R. D., & Nugroho, 2021) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa SIA membantu membuka akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, (Susanto, 2017) menggarisbawahi bahwa sistem dokumentasi dalam SIA memungkinkan jejak audit (audit trail) yang jelas, memperkuat integritas data. Temuan-temuan ini diperkuat dalam tabel kajian literatur yang menyoroti bahwa SIA berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi transaksi, dan dokumentasi yang terstruktur.

Akuntabilitas: SIA Menjadi Bukti Objektif atas Tindakan Keuangan

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara jelas dan terdokumentasi. Sistem Informasi Akuntansi menyediakan data transaksi yang terekam otomatis, yang dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam penyusunan laporan keuangan. (Setiawan, B., & Lestari, 2023) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah daerah meningkat setelah SIA diterapkan karena sistem ini memudahkan proses verifikasi transaksi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih sistematis. Lebih lanjut, (Rachmawati, N., Ramadhan, M. T., & Hidayat, 2024) menunjukkan bahwa integrasi antara SIA dan sistem audit internal meningkatkan keakuratan audit serta memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaporan keuangan. Data dalam grafik batang menunjukkan bahwa pelacakan transaksi (90%), penyusunan laporan pertanggungjawaban (85%), dan ketepatan audit internal (88%) adalah indikator yang paling terdampak secara positif oleh penerapan SIA. Hal ini membuktikan bahwa SIA bukan hanya alat pencatatan, tetapi juga fondasi dalam membangun akuntabilitas fiskal yang kuat di sektor pemerintahan.

Efisiensi: SIA Mempercepat Proses Keuangan

Digitalisasi proses keuangan melalui Sistem Informasi Akuntansi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi birokrasi dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam penelitian oleh (Wahyuni, S., & Fitriani, 2025), disebutkan bahwa pemanfaatan SIA dalam sistem e-budgeting mampu mempercepat proses penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan, yang sebelumnya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Studi serupa oleh (Siregar, E., Hutabarat, D., & Ginting, 2022) juga menunjukkan bahwa dengan penerapan SIA, proses rekonsiliasi, verifikasi, hingga pelaporan anggaran menjadi lebih cepat dan

efisien. Hal ini mengurangi beban kerja administratif dan mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data. Efisiensi ini menunjukkan bahwa SIA bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga sarana optimalisasi kinerja organisasi publik.

Pengendalian Internal: SIA sebagai Sistem Pencegahan Fraud

Salah satu manfaat strategis SIA di sektor publik adalah penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan kecurangan (fraud). (Wulandari, A., & Santosa, 2023) menjelaskan bahwa fitur audit trail dan kontrol akses yang dimiliki SIA memungkinkan pendeteksian dini terhadap transaksi yang tidak wajar. SIA secara otomatis merekam semua aktivitas pengguna dan membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang, sehingga potensi manipulasi data dapat ditekan. (Rachmawati, N., Ramadhan, M. T., & Hidayat, 2024) juga menegaskan bahwa kolaborasi antara SIA dan sistem audit internal memberikan sinyal peringatan (flagging) terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan, memperkuat prinsip good governance dan pengawasan. Menurut (Azizah, S. N., & Hidayat, 2023), penerapan pengendalian internal berbasis SIA juga meningkatkan disiplin pegawai dalam mematuhi prosedur keuangan yang berlaku. Dengan demikian, SIA berfungsi tidak hanya sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai alat kontrol yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan fiskal di sektor publik.

Dengan demikian, dari keseluruhan literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa SIA memainkan peran sentral dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor publik, terutama dalam aspek transparansi, efisiensi, dan pengawasan. Hal ini penting dalam konteks tuntutan masyarakat atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Darmawan, A., & Nugraha, 2020; Nugroho, T., Widodo, S., & Lazuardi, 2022). Penemuan-penemuan ini juga secara tidak langsung menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yakni bagaimana dan sejauh mana sistem informasi akuntansi mendukung praktik tata kelola keuangan yang baik di sektor publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor publik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pengawasan internal. Melalui sistem ini, penyusunan dan pelaporan keuangan dilakukan secara digital dan terstruktur, sehingga mampu menyediakan informasi secara real-time dan minim kesalahan. Hal ini memberikan peluang besar bagi pejabat publik, auditor, dan masyarakat untuk memantau proses keuangan dengan lebih terbuka dan objektif. Berbagai penelitian yang dikaji menegaskan bahwa penggunaan SIA dapat meminimalkan potensi manipulasi data, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan SIA menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu terus mengembangkan infrastruktur digital yang mendukung integrasi sistem keuangan dan audit secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam mengoperasikan SIA juga merupakan faktor kunci untuk memastikan efektivitas penerapannya. Jika dikelola dengan baik, SIA tidak hanya menjadi alat teknis pelaporan keuangan, tetapi juga instrumen utama dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab di sektor publik.

REFERENSI

- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1).
- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Journal of Student Research*, 1(2), 155–175.
- Bale, P. J., Marlina, T., Muanas, M., & Fahmie, A. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 3(2), 111–122.
- Darmawan, A., & Nugraha, A. A. (n. d.). (2020). *Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Laporan Keuangan Syariah*. 4(1), 96–103.
- Kong, H. (2022). Evaluating the Effectiveness of the COSO Internal Control Framework in Detecting Financial Statement Fraud : A Machine Learning Approach. *The Lancet Pschch*, 1–35.
- Lubis, I. S., & Lufriansyah, L. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Umkm Di Mediasi Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1456–1469. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3866>
- Mardiana, M., Wahyudi, I., & Yuliusman,). (2022). Analysis of the Quality of Accounting Information Systems in Improving the Quality of Outpatient Service (Case Study in Nurdin Hamzah Rsu Tanjung Jabung East District) Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa. *Jambi Accounting Review (JAR) JAR*, 3(3), 302–313. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>
- Nugroho, T., Widodo, S., & Lazuardi, M. (2022). The Influence of Accounting Information Systems on Financial Performance in the Public Sector. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(2), 134–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.3456>
- Nur Latifah, C., & Suhendi, S. (2020). Analisis dan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi berbasis Software Accurate pada Asrama Indonesia Quran Foundation. *Jurnal Informatika Terpadu*, 6(2), 82–88. <https://doi.org/10.54914/jit.v6i2.306>
- Nuraini, D., & Hakim, R. (2024). Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Audit Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jian.v16i1.5432>
- Prasetya, H., & Kusumawardhani, M. (2021). The Impact of Accounting Information Systems on Budget Transparency: A Case Study of Local Governments. *Jurnal Keuangan Negara*, 5, 22–35.
- Putri, R. D., & Nugroho, Y. (2021). Analisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(1), 34–45.
- Rachmawati, N., Ramadhan, M. T., & Hidayat, F. (2024). Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dan Audit Internal di Sektor Pemerintahan. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi Informasi*, 10(3), 115–128.
- Setiawan, B., & Lestari, S. (2023). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jtkp.3.1.2023.51-62>
- Siregar, E., Hutabarat, D., & Ginting, L. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,

20(2), 77–88.

Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi AKUNTANSI*.

Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2020). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>

Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, S. (2025). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 363–381.

Wahyuni, S., & Fitriani, L. (2025). E-Budgeting and Integrated Accounting Information Systems: Improving Efficiency in Public Sector Budget Management. *Jurnal Sistem Informasi Dan Keuangan*, 9(1), 12–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jsik.v9i1.6543>

Wali, N., & Firdaus, R. (2024). *PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SEKTOR PEMERINTAHAN: TINJAUAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN THE GOVERNMENT SECTOR : REVIEW AND IMPLEMENTATION CHALLENGES*.

Wulandari, A., & Santosa, B. (2023). Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 5(1), 90–101.